



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	12 (Dua Belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 1 Februari 2018
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengenai Optimalisasi Perluasan Kepesertaan melalui Program Perisai;</li><li>2. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengenai Perluasan Kepesertaan dalam rangka Optimalisasi Kepesertaan Pekerja Non-Formal, Bukan Penerima Upah (BPU);</li><li>3. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengenai Upah Penegakan Hukum terhadap Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban dalam mendaftarkan pekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan;</li><li>4. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka Perluasan Kepesertaan pada Pekerja BPU dalam sistem <i>Online</i>;</li><li>5. Pelaksanaan Program Pemutihan Pemerintah Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia khususnya terkait Jaminan Sosial dengan keluarnya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</li></ol>
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, SH/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I  
Gedung Nusantara I  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 25 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR  
RI; 3 orang anggota izin;  
B. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan  
beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.50 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar melaporkan program-program baru kepada Komisi IX DPR RI yang berimplikasi luas terhadap berbagai hal termasuk aspek pembiayaan dan manajemen sehingga kepentingan masyarakat yang menjadi peserta tidak ada yang dirugikan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program PERISAI yang telah berjalan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang BPJS.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan langkah-langkah yang pro aktif dalam menjangkau perluasan kepesertaan pekerja non formal bukan penerima upah dengan melakukan sosialisasi yang lebih optimal.
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja hari ini tanggal 01 Februari 2018, diserahkan paling lambat pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018.

**Rapat diakhiri pukul 17.45 WIB**

**Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,**



**H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc**  
**A-312**